

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tetap mandiri tanpa menjalin kerjasama dengan negara lain. Pentingnya kerjasama tersebut menyebabkan setiap negara membuka diri untuk melakukan berbagai kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak lain untuk dapat mensejahterakan dan setara dengan negara-negara lain tanpa membedakannya juga untuk terhindar dari intimidasi terhadap negara-negara lain atau pengucilan akan keberadaan negara-negara lainnya.

Menyadari pentingnya hubungan kerjasama internasional antara satu negara dengan negara lainnya, maka bangsa Indonesia juga melakukan banyak kerjasama dengan negara lain di dunia, termasuk melakukan kerjasama dengan negara tetangganya yaitu negara Malaysia sebagai suatu bentuk kerjasama hubungan bilateral dalam pengembangan hubungan di berbagai bidang seperti bidang politik, keamanan, sosial budaya dan pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis fokus kepada bidang pendidikan antar kedua negara (Martin dan Anin, 2021).

Pendidikan melambangkan suatu hal yang sangat esensial dalam proses kemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi saat ini terjadi perubahan yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan

yang strategis adalah pendidikan dan pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa. (Lukman, 2016)

Dalam hal ini negara Indonesia telah menjelaskan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Bab XIII, mengenai Pendidikan yaitu, Pasal 31, butir (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, butir (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945)

Hal serupa tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah NKRI Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, 2003)

Melalui PP No.28/1990 tentang Pendidikan Dasar, Pemerintah Indonesia menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan tujuan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia

pada usia sekolah tujuh tahun hingga lima belas tahun baik yang berada di wilayah teritorial Indonesia maupun diluar teritorial Indonesia. Dilanjutkan kemudian dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dimana pemerintah Indonesia mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Kemendikbud, 2016).

Dalam menjalin hubungan bilateral dengan Malaysia, Indonesia juga seringkali merasakan sebuah permasalahan. Seperti yang banyak diberitakan oleh berbagai artikel bahwa banyak insiden yang mewarnai jalannya hubungan bilateral antar kedua negara ini. Insiden-insiden tersebut yang menjadikan hubungan bilateral antar keduanya sering mengalami pasang surut. Persoalan politik adalah salah satu hal yang cukup menjadi perhatian mengingat bahwa kedua negara serumpun ini pernah terlibat dalam krisis politik yang berujung pada konfrontasi militer. Meski demikian, hubungan diplomatik kedua negara secara umum berjalan dengan baik terlebih dalam bidang pendidikan. Seperti pada hubungan Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin sejak lama salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pendidikan antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun 1970-an, di antaranya meliputi pertukaran pelajar, beasiswa, dan pengaturan visa. Kerjasama ini menindak lanjuti surat kesepakatan kerja, yaitu perjanjian kerjasama saling pengertian di

bidang pendidikan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998.

Kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini terdiri dari pertukaran staf antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia, pertukaran pelajar, program beasiswa, pertukaran tenaga ahli, mempermudah pertukaran publikasi, program pertukaran antara badan-badan perwakilan dan lembaga pelatihan, dukungan bantuan secara timbal balik di dalam bidang kejuruan dan teknik, mengkaji pemindahan kredit atau mata kuliah antara institusi pendidikan, serta mempermudah pertukaran bahan pendidikan, penemuan bahan-bahan penelitian, alat bantu pengajaran, dokumentasi, dan alat peraga yang berhubungan dengan pendidikan, konferensi, simposium, dan seminar.

Kerjasama mengenai pendidikan antar negara Indonesia-Malaysia ini sangat penting untuk diangkat kemudian diteliti terkait dengan kerjasama antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hal meningkatkan taraf pendidikan bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan di Malaysia, terlebih karena negara Malaysia menjadi salah satu negara tetangga yang banyak diminati sebagai tujuan bagi warga Indonesia untuk melanjutkan pendidikan . Hal penting yang perlu diingat bahwa anak-anak Indonesia di Malaysia sama seperti anak-anak lainnya yang ada di Indonesia, mereka berhak mendapatkan layanan

pendidikan yang tinggi di manapun mereka berada. (Anita, Darwis, dan Aswin, 2021)

Kerjasama Pendidikan antara Indonesia dan Malaysia salah satunya adalah peningkatan taraf pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah, Malaysia. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kewajiban suatu negara khususnya Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negaranya termasuk yang berada diluar wilayah teritorial Indonesia.

Dalam sistem pendidikan Malaysia sendiri, Kementerian Kerajaan Malaysia mewajibkan belajarkan untuk warga negaranya selama 11 tahun, yakni untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan dasar ini diwajibkan meliputi semua anak yang berusia mulai 7 hingga 12 tahun. Pemerintah Malaysia telah memberikan pelayanan pendidikan kepada semua penduduk yang tinggal di dalam wilayah teritorial Malaysia, termasuk sabah. Setiap penduduk diperbolehkan untuk mengikuti dan atau mendapatkan pelayanan pendidikan di tiap sekolah yang berada di malaysia.

Sebagai negara sahibulbait tentunya Malaysia lebih memprioritaskan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negaranya sendiri. Dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya, Pemerintah Malaysia memberikan batasan kapasitas yakni sesuai dengan jumlah warga negaranya (usia didik) yang memerlukan pelayanan pendidikan di Malaysia. Sedangkan bagi warga negara asing

yang ingin mendapatkan layanan pendidikan harus menunggu hingga tersedianya tempat di sekolah. Persyaratan umum untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah yang berada di Malaysia antara lain merupakan penduduk asli Malaysia, warga negara asing yang legal, mempunyai cukup umur serta tersedianya tempat di sekolah.

Sebelum Tahun 2002, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya di sekolah kerajaan Malaysia tanpa adanya dokumen. Tetapi setelah dikeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi. Semua pekerja asing harus memiliki dokumen lengkap dan semua pelajar asing juga harus memiliki dokumen lengkap. Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik sekolah Kerajaan (Sekolah Negeri) maupun sekolah swasta sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Hal-hal yang sulit dipenuhi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, antara lain dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat (Christie, 2016).

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian skripsi yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu :  
Bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi anak TKI yang berada di sabah, Malaysia?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat kerjasama pendidikan Indonesia-Malaysia untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak TKI yang berada di sabah, Malaysia.

## 1.4 KERANGKA PENELITIAN

### **Kebijakan Luar Negeri**

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Anak Agung banyu Perwita, p. 47). Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai di dalam negara. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara atau aktor-aktor dalam sistem internasional (Aleksius, 2008, p. 61).

Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternalnya (Carlsness, 2013, p. 707). Kebijakan luar negeri dapat ditujukan untuk menyelesaikan konflik, permasalahan, serta untuk menjalin kerjasama atau difokuskan pada isu-isu tertentu. Kebijakan luar negeri dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya. Menurut Howard Lentner, pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai (*selection of objectives*), pengerahan sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan (Aleksius, 2008, p. 65).

Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano C Jack, 1999, p. 5). Kebijakan luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh

karena itu, aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kebijakan luar negeri (Soeprapto, 1997, p. 187). Konsep kebijakan luar negeri dalam penelitian ini akan digunakan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan nasional Indonesia, terkait isu pendidikan anak-anak TKI yang berada di Malaysia. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah di luar batas negaranya.

## **1.5 HIPOTESA**

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang dilihat dari kondisi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada di Sabah, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam menangani pendidikan anak-anak TKI tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dibagi kedalam dua upaya yaitu untuk menangani pendidikan anak TKI yang berada di Sabah maka perlu diadakannya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia serta NGO karena pihak pemerintah Indonesia saja tidak dapat melakukan penanganan mandiri jika negara tempat para TKI berjuang hidup tidak memberi ijin dan ikut serta dalam upaya penanganan pemberian pelayanan pendidikan. Kemudian upaya pemerintah Indonesia itu sendiri seperti pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, kelompok belajar atau Community Learning Center dan juga pengiriman langsung tenaga pendidik ke Sabah.

## **1.6 METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yang merupakan gabungan antara tipe penelitian eksplanatif dan prediktif. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam bidang pendidikan serta mencoba memprediksikan hubungan bilateral antar kedua negara.

### **1.6.2 Batasan penelitian**

Batasan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Penelitian dengan judul “Kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam mengembangkan Pendidikan anak TKI di Sabah” akan berfokus membahas mengenai prospek dari kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam bidang pendidikan, dimana Malaysia adalah negara tetangga yang cukup diminati untuk dijadikan tujuan bagi warga negara Indonesia untuk melanjutkan

pendidikan, penulis juga berfokus membahas mengenai manfaat dari kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam bidang pendidikan. Batasan tahun yang penulis ambil adalah tahun 2011 hingga 2021, dimana pada tahun 2011 Pemerintah Malaysia menyetujui untuk memberi akses pendidikan kepada anak warga negara Indonesia.

### **1.6.3 Sumber data**

Sumber data yang paling utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksud merupakan data yang diperoleh dari pelbagai literatur data melalui telaah pustaka, berupa buku, jurnal, surat kabar, serta internet.

### **1.6.4 Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur terpercaya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas berupa buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar atau majalah, dan artikel di situs-situs internet.

### **1.6.5 Teknik Analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif yaitu teknik menganalisis dengan menjelaskan, menguraikan atau menggambarkan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta yang terjadi.

Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi disusun berdasarkan Bab I sampai dengan Bab III, dengan rincian sebagai berikut:

I. Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis dan metodologi penelitian.

II. Bab II membahas tentang dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang meliputi sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan, Permasalahan Pendidikan yang dialami anak TKI di Malaysia, hingga kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta membahas tentang Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan layanan pendidikan di Sabah, Malaysia

III. Bab III berisi kesimpulan dan penutup.